

PESANTREN DAN ISLAM WASATHIYAH: ULAMA, TRADISI INTELEKTUAL DAN AKAR SOSIAL MODERASI ISLAM

Muhammad Nida' Fadlan¹, Ali Munhanif², Agus Nilmada Azmi³
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}

Abstract

Pesantren as Islamic educational institutions have undergone institutional transformation. Pesantren have been able to become a means for the emergence of a new generation of Muslim educated people who are familiar with modern terms. This research will examine how socio-political attitudes and orientations develop in pesantren today. The pesantren that become the object of this research are Pesantren Buntet Cirebon, Pesantren Tebuireng Jombang, and Pesantren API Tegalrejo. Through these pesantrens, this research will look at the extent to which the continuity aspect of the pesantrens in maintaining their traditions over the centuries. In addition, this study will also capture the changes experienced by pesantren in responding to the development of attitudes and behaviors regarding contemporary and religious issues. Through the two aspects above, this research is expected to obtain an overview of the views of kyai and pesantren in viewing the idea of Wasathiyah Islam, especially related to issues of socio-cultural plurality, tolerance, democracy, and issues of civic values that develop in society.

Keywords: *Pesantren, continuity, changes, Islam Wasathiyah, Islamic moderation.*

Abstrak

Dewasa ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman telah mengalami transformasi kelembagaan sedemikian rupa. Pesantren telah mampu menjadi sarana tampilnya kalangan terpelajar Muslim generasi baru yang akrab dengan terma-terma modern. Dari kecenderungan tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk melihat bagaimana sikap dan orientasi sosial politik yang berkembang di pesantren-pesantren dewasa ini. Adapun pesantren-pesantren yang menjadi objek penelitian ini adalah Pesantren Buntet Cirebon, Pesantren Tebuireng Jombang, dan Pesantren API Tegalrejo. Melalui pesantren-pesantren tersebut, penelitian ini akan melihat sejauh mana aspek kontinuitas (*continuity*) pesantren dalam mempertahankan tradisinya selama berabad-abad. Selain itu, penelitian ini juga akan memotret perubahan (*change*) yang dialami pesantren dalam merespon perkembangan sikap dan perilaku menyangkut isu-isu kontemporer dan keagamaan. Melalui dua aspek di atas, penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai pandangan kyai dan pesantren dalam melihat gagasan Islam Wasathiyah khususnya terkait isu-isu pluralitas sosial-budaya, toleransi, demokrasi, dan isu *civic values* yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Pesantren, Kontinuitas, Perubahan, Islam Wasathiyah, Moderasi Islam

Copyright (c) 2024 Muhammad Nida' Fadlan¹, Ali Munhanif², Agus Nilmada Azmi³

✉ Corresponding author : Muhammad Nida' Fadlan
Email Address : m.nida@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Pesantren telah lama diakui sebagai sumber transmisi dan diseminasi nilai-nilai dan praktik-praktik keagamaan Islam di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, corak dan artikulasi keberagaman yang tumbuh di pesantren dipercaya akan memberi warna bagi kecenderungan Islam yang berkembang di tanah air. Tumbuhnya fenomena sosial-keagamaan yang moderat dan toleran diakui banyak kalangan dapat ditelusuri akarnya di dalam tradisi keagamaan pesantren. Berdasarkan hipotesis ini, bisa dikatakan bahwa menjadikan sistem pendidikan pesantren sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan Islam secara umum di Indonesia bukanlah cita-cita yang terbangun tanpa pijakan kultural. Menjadikan epistemologi pendidikan pesantren dalam program pengembangan pendidikan Islam di Indonesia merupakan satu ikhtiar penting yang bertitik tolak pada peran strategis pesantren sebagai pusat religiusitas Islam seperti disebut di atas. Upaya tersebut adalah satu bentuk kelanjutan dan perubahan (*continuity and change*) dari peran pesantren baik dalam pengajaran Islam maupun dalam penguatan pengetahuan masyarakat.

Artikel ini hendak memotret pesantren sebagai institusi pendidikan Islam secara sosio-historis. Dalam kaitan itu, artikel ini ingin menggali sejumlah definisi etimologis pesantren dan asal-usul historisnya seperti yang dikemukakan banyak kajian keserjanaan. Kemudian akan diperlihatkan secara singkat perkembangan pesantren dalam lintasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Termasuk juga yang akan dibahas dalam bagian ini adalah hakikat, tujuan, dan pengembangan Islam wasathiyah (Islam moderat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam peran pesantren menjadi sarana tampilnya kalangan terpelajar Muslim generasi baru yang akrab dengan terma-terma modern. Dari kecenderungan tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk melihat bagaimana sikap dan orientasi sosial politik yang berkembang di pesantren-pesantren dewasa ini. Adapun pesantren-pesantren yang menjadi objek penelitian ini adalah Pesantren Buntet Cirebon, Pesantren Tebuireng Jombang, dan Pesantren API Tegalrejo. Penelitian ini melihat sejauh mana aspek kontinuitas (*continuity*) pesantren dalam mempertahankan tradisinya selama berabad-abad. Selain itu, penelitian ini juga akan memotret perubahan (*change*) yang dialami pesantren dalam merespon perkembangan sikap dan perilaku menyangkut isu-isu kontemporer dan keagamaan. Melalui dua aspek di atas, penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai pandangan kyai dan pesantren dalam melihat gagasan Islam Wasathiyah khususnya terkait isu-isu pluralitas sosial-budaya, toleransi, demokrasi, dan isu *civic values* yang berkembang di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para subjek, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, lalu dianalisis dan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Pelembagaan Pesantren

Secara etimologis, “pesantren” berakar dari kata “santri”. Seperti dikutip dari Dhofier, Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji” (Dhofier, 1982). Sementara menurut C.C. Berg, kata “santri” berasal dari istilah bahasa India: shastri, yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu (Berg, 1932). Sedangkan shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Chatuverdi dan Tiwari, 1970). Penjelasan ini menegaskan bukti kuat bahwa telah terjadi pengambil- alihan tradisi sosial keagamaan

dan lembaga pengajaran agama pra-Islam yang berlangsung bersamaan dengan proses Islamisasi masyarakat di Nusantara.

Definisi lain diberikan oleh Madjid, yang lebih menekankan aspek lokal-Jawa dalam menggali kata "santri". Meskipun tidak berasal dari penelitian tentang pesantren, Madjid menengarai bahwa santri berasal dari bahasa Jawa: *cantrik*. Kata ini menggambarkan seseorang yang selalu mengikuti gurunya ke manapun guru ini pergi dan menetap dengan tujuan untuk belajar darinya mengenai suatu keahlian. Pola hubungan guru-*cantrik* ini kemudian diadopsi oleh sistem pengajaran Islam menjadi guru-santri. Istilah guru, untuk kemudian, berkembang berbeda dalam masyarakat pesantren dengan sebutan *kiai*, yang berarti tuan yang dihormati. Istilah *kiai* berkembang menjadi sebutan khusus untuk menyebut guru agama terkemuka yang dihormati. Menurut Madjid, meski masih berlangsung di sebagian kecil kalangan masyarakat Islam, tradisi guru-*cantrik* ini sudah jarang dilakukan oleh seseorang yang ingin memperoleh keahlian tertentu. Salah satu keahlian yang masih menerapkan tradisi ini adalah profesi *dalang* dalam dunia pewayangan di Jawa (Madjid, 2010). Pesantren juga dikenal dengan sebutan "pondok". Istilah ini boleh jadi berasal dari bangunan asrama atau tempat tinggal para santri yang terbuat dari bambu. Terdapat satu penafsiran bahwa kata *pondok* sendiri berasal dari kata Arab *funduk* yang artinya hotel atau asrama (Steenbrink, 1986).

Pesantren tumbuh dan berkembang seiring dengan proses Islamisasi yang berlangsung intensif di kepulauan Nusantara. Namun, kapan persisnya tradisi pendidikan Islam model pesantren itu muncul hingga melembaga, para ahli umumnya tidak menyimpulkan secara seragam. Salah satu pendapat menyebut bahwa bentuk lembaga keagamaan seperti pesantren dapat ditelusuri pertumbuhannya sejak awal kedatangan Islam: ketika mulai muncul komunitas-komunitas Islam awal di Nusantara. Sebagai institusi pendidikan Islam klasik di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa Tenggara, pesantren muncul sejak abad ke-13 dan diberi nama seperti *dayah* (Aceh), *pondok* (Jawa Barat), *nyantren* (Madura), dan sebagainya, menurut Abdul Mun'im DZ. (Sholeh, 2007). Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan ini telah menjadi pusat penyebaran Islam yang bercorak sufistik.

A.H. Johns, seorang antropolog yang banyak meneliti komunitas Muslim awal Aceh, mengkritik teori bahwa pedagang memainkan peran utama dalam penyebaran Islam. Johns juga menolak teori bahwa perkawinan antara pedagang dan anggota keluarga bangsawan menyebabkan gelombang besar penganut Islam. Johns menegaskan melalui kritik itu bahwa para sufi pengembara adalah orang yang terutama menyebarkan Islam di Nusantara. Para sufi ini dinilai telah berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara, setidaknya sejak pertengahan abad ke-13 M (Johns, 1961). Berpijak pada tradisi sufistik yang melekat pada Islam Indonesia, Nurcholish Madjid mendukung teori sufi ini. Dia mengatakan bahwa gerakan kaum sufi mempertahankan semangat keagamaan dan membantu menyebarkan Islam ke berbagai wilayah terjauh dari Arabia, seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan pedalaman Benua Afrika, ketika kaum Muslim mengalami kemunduran dalam politik dan kegiatan militer Islam pada abad ke-12 dan 13. (Madjid, 1974).

Jaringan dan model keberagaman kaum sufi ini menjadi faktor terpenting yang menentukan keberhasilan perpindahan agama di kalangan masyarakat di Nusantara. Johns berpandangan bahwa, hal ini disebabkan oleh kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian Islam atau kontinuitas ketimbang perubahan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Dalam lensa teoritis ini, salah satu sumbangan utama teori sufi adalah terbentuknya pemahaman yang menghubungkan antara konversi agama dengan pertumbuhan institusi-institusi keagamaan Nusantara, seperti pesantren, madrasah, perkumpulan

tarekat, paguyuban pemuda (futuwwah), serta kelompok dagang dan pengrajin budaya Muslim (Azra, 1994). Dhofier menyimpulkan bahwa pesantren pada masa awal merupakan kombinasi madrasah dan tempat kegiatan tarekat berdasarkan kontribusi kaum sufi dalam pembangunan institusi Islam di Nusantara tersebut. Pertumbuhan corak keberagamaan yang demikian berhasil menghindari terjadinya pertentangan antara syariah dan tarekat dalam tradisi keagamaan yang melembaga di kalangan masyarakat Muslim di Jawa (Azra, 1994).

Namun demikian, meskipun tak bisa dipastikan awal kemunculan pesantren, menurut Dhofier, pelembagaan sistem pendidikannya telah dikenali pada periode awal tumbuhnya komunitas santri. Dalam karya sastra Jawa klasik seperti *Serat Cebolek* dan *Serat Centini*, pada awal abad ke-16, diceritakan bahwa telah diketahui sejumlah pesantren terkenal pada masa itu yang menjadi pusat-pusat pengajaran agama. Berbagai kitab Islam klasik dalam bidang yurisprudensi, teologi, dan tasawuf diajarkan pada Pesantren-pesantren tersebut (Dhofier, 1982). Dalam perspektif kelembagaan inilah, keberadaan sistem pendidikan pesantren menjadi salah satu bukti penting dari kontinuitas Islam bercorak sufi yang tetap bertahan dalam praktik budaya dan keagamaan lokal, sebagaimana yang dikemukakan Johns. Kontinuitas yang dimaksud bahwa pesantren merupakan warisan tradisi pendidikan Hindu-Budha yang tetap dipertahankan ketika Islam datang dan berkembang di Nusantara.

Mencermati perdebatan tentang pertumbuhan dan pelembagaan pesantren di atas, isu penting yang harus dikemukakan di sini adalah bahwa perkembangan sistem pendidikan pesantren sebagai institusi utama pengajaran Islam yang dikenal dewasa ini berlangsung secara tidak linier. Proses ini terjadi saat pesantren mengalami perubahan internal dan eksternal saat menghadapi tantangan dan perkembangan sosio-politik dan keagamaan di Nusantara. Pesantren pada masa awal Islam di Nusantara merupakan representasi budaya kota yang secara politik bergabung dengan kekuasaan istana. Menurut Taufik Abdullah, ini diwakili oleh istana (raja), pasar (pedagang), dan pesantren dan masjid (ulama). Ini terjadi pada periode antara abad ke-13 sampai abad ke-17 (Abdullah, 1987). Pesantren sangat penting secara politik karena mereka mendukung komunitas politik dan memberikan legitimasi kepada kerajaan (Burhanudin, 2007). Salah satu dampak langsung dari perdagangan internasional adalah meningkatnya kosmopolitanisme keagamaan selama periode ini dalam kehidupan keagamaan. (Abdullah, 1987).

Integrasi tiga wilayah kehidupan kultural ini berubah ketika pusat-pusat kekuasaan mulai melemah. Salah satu faktor utama dari perubahan ini adalah semakin intensifnya penetrasi kolonialisme Eropa di bidang ekonomi, politik dan pemerintahan antara abad 17 dan 18. Pada awal abad 19, VOC, yang menjadi agen dari roda ekonomi Belanda, mulai mengambil peran dalam jaringan perdagangan di Nusantara. Secara perlahan tapi pasti, penetrasi kolonialisme Eropa ini menggeser hubungan antara pusat-pusat kekuasaan dengan pesantren. Pada titik inilah, pesantren menyebar ke pedalaman menjauhkan diri dari pusat-pusat politik dan ekonomi, hingga akhirnya terpinggirkan juga terpinggirkan juga secara kultural (Burhanudin, 2007).

Implikasi dari perubahan ini sangat besar. Selain pesantren berkembang menjadi komunitas alternatif, dan para ulama yang memimpin lembaga itu muncul sebagai elit sosial tersendiri (counter-elite), sebagaimana akan dipaparkan nanti, pesantren juga tumbuh menjadi sebuah lembaga yang mengembangkan konsep pendidikan tersendiri yang jauh berbeda dari komunitas lainnya. Taufik Abdullah menunjukkan bahwa, dalam situasi ini komunitas pesantren memperlihatkan sikap akomodasionistik terhadap realitas sosial dan politik yang dihadapi yang pada gilirannya membentuk watak diskursifnya melalui khazanah ilmu-ilmu tradisional Islam: fikih, akhlaq, tasawuf, dan ajaran politik dengan keharusan bertahan dari berbagai serangan politik. Pada titik ini, tidak mengherankan bahwa pesantren

akhirnya menggali sumber-sumber lama yang telah dimiliki, dan meneruskan apa yang telah diwarisi (Abdullah, 1987).

Dalam konteks terputusnya komunitas Islam Nusantara dari watak kosmopolitanisme inilah intensifikasi khazanah keilmuan tradisional Islam berkembang di lingkungan pesantren. Dan dengan semakin jauhnya keterpisahan hubungan pesantren dari kehidupan sosial-politik di pusat-pusat kerajaan, komunitas santri juga semakin berpaling pada orthodox Islam, khususnya yang berpusat di Jazirah Arabia. Implikasi dari perkembangan ini telah menjadikan pesantren makin melihat ke dalam ajaran agama, sehingga tradisi tasawuf dan mistisisme berkembang pesat dan membentuk pola kehidupan pesantren secara intensif.

Pada saat yang sama, pesantren juga menjadi tempat alternatif bagi para satria-bangsawan yang tidak puas dengan kondisi istana. Di sinilah pertemuan kerajaan dan pesantren dalam tradisi kepujangaan menemukan momentumnya. Buku-buku yang ditulis oleh pujangga keraton mengandung mistisisme Islam, menciptakan apa yang disebut Abdullah sebagai "...sebuah pertemuan dari dua dunia kultural yang telah terbelah." (Abdullah, 1987)

Peran ulama dalam tradisi Islam Nusantara berubah karena perubahan lingkungan sosiopolitik. Pada masa lalu, di kota-kota pusat kerajaan, ulama biasanya berfungsi sebagai penasihat agama dan politik bagi raja, tetapi di pedalaman, para ulama lebih banyak terlibat dalam masalah masyarakat. Pesantren kemudian berkembang menjadi tempat penting di mana ulama mengajarkan keagamaan kepada komunitas sekitarnya.

Di sinilah ulama menjadi apa yang oleh Geertz disebut sebagai pialang budaya (cultural broker) (Burhanudin, 2007). Pengertian dasar pialang budaya adalah individu yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan pengetahuan agama dalam rangka membentuk watak kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, ulama memiliki peluang besar untuk membangun ortodoksi Islam Nusantara dan mulai memerangi praktik-praktik lokal ke dalam terma-terma hukum syari'ah. Umumnya langkah ini diambil dalam rangka menjaga substansi ajaran ideal keagamaan Islam dan pada saat yang sama mengakomodasi realitas sosial budaya masyarakat Nusantara (Burhanudin, 2007). Watak akomodatif Islam inilah yang kemudian berkembang menjadi watak dasar budaya komunitas Muslim santri secara keseluruhan.

Gambaran historis ini menjelaskan satu fenomena penting yang menempatkan lembaga pesantren sebagai basis Islamisasi Indonesia sejak awalnya. Dalam pengertian yang demikian, bisa disimpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia terbentuk dari hasil dialog antara ajaran Islam universal dengan tantangan lembaga dan budaya local Nusantara (Madjid, 1994). Pertemuan yang harmonis antara doktrin Islam dengan institusi local tadi pada gilirannya membuka jalan bagi berkembangnya tradisi keagamaan yang moderat dan relatif terbuka yang ditunjukkan banyak pesantren di wilayah pedesaan di Jawa. Bisa dikatakan bahwa tradisi lokal tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengotori kesucian agama, tetapi justru diakomodasi dalam rangka memperkaya penafsiran ajaran-ajaran pokok Islam (Eliraz, 2008). Dalam perkembangannya lebih lanjut, budaya toleran inilah yang pada gilirannya menjadi basis penting bagi berkembangnya pemahaman Islam yang moderat.

Meskipun proses perkembangan dan pelebagaan pesantren yang digambarkan di atas menjadi pandangan yang dominan, sejumlah argumen juga dipaparkan ahli tentang Islam Indonesia. Martin van Bruinessen, seorang antropolog berkebangsaan Belanda, membantah pendapat yang menyatakan lembaga pendidikan Islam model pesantren telah ada jauh sebelum abad ke-19. Menurutnya, sebagai lembaga yang identik dengan penyebaran Islam, kemunculan pesantren tidak terjadi pada masa-masa awal Islamisasi, melainkan pada sekitar akhir abad ke-18 dan mengalami pematapannya dalam bentuk lembaga pada abad ke-19.

Dari pengamatannya terhadap sejumlah naskah klasik di Jawa, Bruinessen menyimpulkan bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 yang ada hanya sebatas guru yang mengajarkan agama Islam di masjid atau istana dan ahli tasawuf yang menetap di tempat-tempat terpencil atau di dekat makam keramat. Sejumlah pesantren awal sangat mungkin berkembang dari tempat-tempat ini, namun menurutnya mengalami pelembagaan pada masa-masa belakangan (Bruinessen, 1995).

Dokumen pertama terkait jumlah pesantren di Indonesia ditemukan dalam laporan pemerintah Belanda pada 1831. Zamakhsari Dhofier menunjukkan, laporan Pemerintah Belanda tahun 1831 tentang lembaga pendidikan penduduk “asli” Jawa mencatat terdapat 1.853 lembaga dengan murid berjumlah 16.556 orang. Laporan itu mencatat jumlah lembaga-lembaga Islam tradisional – pengajian, pesantren, dan jumlah murid-muridnya di wilayah-wilayah kabupaten yang kuat keislamannya di Jawa dan Madura. Akan tetapi laporan itu tidak membedakan antara pesantren dan pembaga keagamaan lain seperti pengajian atau perkumpulan tarekat. Selain itu, dilaporkan bahwa sejumlah besar lembaga-lembaga tersebut hanya mengajarkan pembacaan Qur’an, hanya sebagian kecil murid diajar menulis Arab (Van der Chijs, 1864).

Perubahan penting terjadi pada 1910. Pada tahun ini pesantren-pesantren, diantaranya Pesantren Denanyar di Jombang, mulai membuka kesempatan untuk santri- santri perempuan. Pada tahun 1920, beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pesantren Singosari di Malang juga mulai mengajarkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, dan sejarah. Menurut Dhofier, diperkenalkannya sistem madrasah, dibukanya kesempatan pendidikan untuk perempuan di pesantren, dan diberikannya pendidikan umum di pesantren merupakan jawaban positif para kiai pesantren terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 (Dhofier, 1982).

Pada awal tahun 1930-an, banyak pesantren, di antaranya Pesantren Tebuireng, yang mempunyai santri lebih dari 1.500 orang. Survei yang dilakukan oleh kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa 1942-1945) pada tahun 1942 mencatat jumlah madrasah dan pesantren sebanyak 1.871 dengan muridnya berjumlah 139.415. Namun, survei tahun 1942 itu tidak membedakan pesantren dan madrasah. Pengaruh pesantren mulai menurun drastis setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949. Sebabnya, pemerintah Indonesia memusatkan diri pada pengembangan sekolah umum seluas- luasnya dan dibukanya jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan khusus bagi mereka yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Banyak pesantren kecil menutup kegiatannya pada dasawarsa 1950-an. Meskipun pesantren-pesantren besar dapat bertahan, mereka memaksakan diri untuk memasukkan lembaga-lembaga pendidikan umum (Dhofier, 1982).

Steenbrink mencatat, sejak awal dasawarsa 1970-an terjadi diversifikasi dalam dunia pesantren, terutama akibat kebijakan depolitisasi pemerintah Orde Baru. Kebijakan itu telah mendorong banyak aktivis Muslim aktif bergerak di bidang dakwah dan pendidikan ketimbang politik. Berbeda dari diversifikasi yang terjadi pada abad ke-19, yang biasanya menyentuh di bidang ilmu-ilmu Islam tradisional seperti nahwu (grammar), sharaf (tenses), hadis, atau penghapalan dan pembacaan Qur’an, maka diversifikasi pada periode ini adalah pada masalah keterampilan.

Misalnya, berdirinya Pesantren Pertanian Darul Fallah di Ciampea, Bogor, dan program pemberdayaan masyarakat di Pesantren Pabelan di Muntilan, Magelang, dimaksudkan untuk mengembangkan pengajaran koperasi, teknologi tepat guna di bidang pertanian, pembangunan air bersih, dan pertukangan. Selain itu, beberapa pesantren di dekat atau di dalam kota besar telah menjadi asrama, di mana mahasiswa dari berbagai jurusan ilmu bisa bertemu dalam lingkungan yang khas Islam. Contohnya

adalah Pesantren As-Syafi'iyah di Jakarta dan Pesantren Jamsaren di Solo. Yang juga penting dicatat, selain telah mempunyai madrasah, sejumlah pesantren juga menyelenggarakan sekolah umum seperti SMP dan SMA, bahkan mendirikan fakultas umum dalam kampusnya sehingga mengundang santri yang tidak homogen lagi (Steenbrink, 1986).

Selain itu, tercatat peningkatan kuantitatif dalam jumlah pesantren dan santrinya, setidaknya selama tiga puluh tahun terakhir abad ke-20. Menurut data statistik Kementerian Agama, jumlah pesantren di Indonesia mencapai sekitar 4.195 pada tahun 1977 dengan jumlah santri sekitar 677.384 orang. Pada tahun 1981, jumlah pesantren tersebut meningkat menjadi 5.661, dengan jumlah santri sekitar 938.397. Pada tahun 1985, jumlah pesantren tersebut meningkat menjadi 6.239, dengan jumlah santri sekitar 1.084.801 orang. Pada tahun 1997, jumlah pesantren meningkat menjadi 9.388, dengan jumlah santri s Data tahun 2006 menunjukkan bahwa ada sekitar 14.798 pesantren dengan 3.464.334 guru (Haedari, 2006).

Ulama dan Nilai-nilai Moderasi Islam

Berdasarkan paparan tentang proses historis pelebagaan pesantren itulah, pengertian umum tentang lembaga dan karakter pendidikan pesantren dewasa ini dirumuskan. Umumnya, sebuah pesantren dimengerti sebagai suatu komunitas yang terd iri dari rumah kiai (pengasuh), tempat peribadatan (masjid atau langgar atau surau) beserta tempat berwudlu, rumah pemondokan atau asrama untuk bermukim para santri (dulu sangat sederhana terbuat dari bambu atau kayu), dan ruangan untuk memasak atau dapur yang biasanya berada tidak jauh dari asrama. Semakin besar jumlah santri, jumlah bangunan dalam lingkungan pesantren pun semakin banyak (Steenbrink, 1986).

Misalnya, model pendidikan pesantren didefinisikan oleh Dhofier sebagai sistem pengajaran Islam yang terdiri dari lima komponen. Pertama, ada pondok, atau asrama, di mana para santri tinggal dan belajar. Kedua, ada masjid, yang digunakan untuk kegiatan ritual dan juga digunakan untuk proses belajar-mengajar. Ketiga, santri, yaitu orang-orang yang datang kepada kiai untuk belajar agama. Keempat, kiai, yaitu ahli agama Islam yang berfungsi sebagai tokoh utama dalam pesantren, memberikan pelajaran agama dan menjadi inspirasi bagi seluruh santri. Kelima, instruksi dari kitab kuning, yaitu kitab-kitab klasik tentang topik-topik utama ajaran Islam, seperti fikih, usul fikih, hadis, tafsir, akhlak, tasawuf, dan lain-lain. Dalam pesantren, kelima komponen tersebut merupakan komponen utama (Dhofier, 1982).

Karenanya, sebagai sebuah tradisi sosial keagamaan, bentuk tata ruang pesantren di atas tidak hanya menggambarkan tempat belajar-mengajar pengetahuan agama, tetapi juga mencerminkan karakter sosial pesantren yang lebih luas, yakni fakta bahwa pesantren telah menjadi tempat di mana nilai-nilai dan aktivitas social agama diimplementasikan secara bersama-sama dan kontinyu. Meminjam kata-kata Steenbrink,

"Tidak ada tempat lain dimana shalat didirikan dengan taat seperti disana. Pada siang hari, dimana -mana orang dapat mendengar para santri membaca Al-Qur'an dengan lagu yang indah, memperbaiki bacaan dengan tajwid yang benar, atau hanya untuk mengharapkan pahala dari membaca Al-Qur'an. Pada malam hari juga dapat dijumpai suasana orang membaca Al-Qur'an, melagukan kalam ilahi, dan mendirikan shalat di tengah keheningan malam." (Steenbrink, 1986)

Dari segi pengajaran agama, pesantren memang tidak memberikan hasil yang dapat dikuantifikasi tentang jumlah ulama yang dihasilkannya. Karena itu, muncul anggapan bahwa pesantren tidak memberikan hasil yang baik dalam hal pengajaran formal. Namun, menurut Steenbrink, justru pengaruh agamis yang dihasilkan oleh

lingkungan pesantren yang khas, seperti menjalankan shalat dan kewajiban Islam lainnya secara taat, itulah yang lebih penting dari pendidikan formal. Apalagi, harapan para santri dan orang tua mereka juga bukan agar mereka menjadi ulama, melainkan agar mereka menjadi orang Islam yang baik.

Sementara itu, bagi yang ingin menjadi ulama, mereka harus belajar secara serius dan mengikuti kurikulum yang ada di pesantren tempatnya belajar. Di masa dulu, banyak santri yang biasanya berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, terutama yang dipimpin oleh kiai-kiai yang termasyhur, untuk memperoleh ilmu-ilmu yang memadai. Sebagian di antaranya bahkan pergi belajar ke Mekkah selama beberapa tahun untuk belajar pada ulama yang bertaraf internasional dalam pengajaran agama (Steenbrink, 1986).

Dhofier menilai justru pemimpin-pemimpin pesantren berhasil melahirkan sejumlah besar ulama yang berkualitas tinggi dan itu disebabkan karena metode pendidikan yang dikembangkan oleh para kiai pesantren. Menurut Dhofier, tujuan pendidikan di pesantren tidak semata-mata untuk mencerdaskan para santri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Para santri diajarkan nilai-nilai hidup sederhana, jujur, serta belajar sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pendeknya, selain mengajarkan pendidikan agama, pesantren juga mengembangkan pendidikan karakter para santri sehingga dapat menjadi muslim yang taat dan saleh. Selain itu, para santri diberi tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan mereka tentang Islam kepada orang lain (Dhofier, 1982). Yang terakhir ini boleh jadi menjadi dorongan mengapa banyak santri yang setelah selesai belajar di pesantren kemudian mengabdikan diri untuk mengajar agama di kampung tempat tinggalnya, mulai dari sekad ar di masjid hingga mendirikan pesantren baru.

Dari beberapa penjelasan tersebut, beberapa poin penting dapat dicatat di sini. Pertama, pesantren menjadi transmiter ilmu pengetahuan Islam dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Kedua, pesantren menjadi tempat di mana ajaran-ajaran dan ritual-ritual Islam dipraktikkan. Dan dengan itu, diharapkan para santri kemudian dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dan praktikkan di pesantren dalam kehidupan mereka di masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Ketiga, pesantren menjadi lembaga pencetak ahli-ahli Islam atau para ulama yang paling kredibel dan representatif. Dalam konteks modern, pesantren menjadi basis sosio-intelektual pemikiran Islam di Indonesia.

Para alumnus pesantren memiliki modal yang memadai untuk berbicara tentang Islam karena sumber-sumber keislaman yang kaya. Selain itu, pemikiran Islam yang dikembangkan oleh para intelektual Muslim santri ini memiliki pijakan yang kuat pada tradisi Islam yang berkembang dalam sejarah Islam, yang diwariskan dari pesantren ke pesantren. Intelektual Muslim seperti Mukti Ali, Munawir Syadzali, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid pernah belajar di pesantren. Pesantren memiliki kekuatan untuk berbicara tentang Islam karena basis keislaman mereka yang kaya (Anwar, 2007). Ketiga peran penting tersebut merupakan tugas utama pesantren sejak awal berdirinya.

Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia – dan di seluruh Nusantara – dengan ketiga peran tersebut. Pesantren didirikan oleh masyarakat Muslim sebagai tempat untuk belajar Islam. Di sana, para santri belajar tentang ajaran Islam dan kemudian berkembang menjadi tokoh agama yang paling berpengaruh dalam menjalankan tradisi Islam di masyarakat.

Demikianlah, pesantren berkembang menjadi sistem pendidikan tersendiri yang khas, dengan kemampuan daya tahan yang unik. Cukup beralasan jika Wahid menyebut pesantren sebagai subkultur. Menurut Wahid, pendapatnya didasarkan pada beberapa hal: (1) keberadaan pesantren sebagai lembaga kehidupan yang berbeda dari kebiasaan di negeri ini, (2) adanya berbagai penunjang yang mendukung kehidupan pesantren, (3) proses pembentukan tata nilai unik dengan simbol-simbolnya, dan (4)

adanya daya tarik di luar, yang membuat masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif yang ideal. (Wahid, 1974). Tiga komponen utama yang mendukung pesantren sebagai subkultur disebutkan oleh Wahid: (1) gaya kepemimpinan yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara, (2) kitab rujukan umum yang telah ada selama berabad-abad, dan (3) sistem nilai yang dianut oleh masyarakat luas. (Wahid, 1999).

Sistem Pesantren dan Perubahan Sosial

Berdasarkan kurikulum dan model pendidikan yang digunakan, pesantren di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam setidaknya dua kategori utama. Pertama, pesantren salaf atau salafiyah, yang juga disebut sebagai "pesantren tradisional". Banyak pesantren tua di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Di pesantren salafi, hampir semua pendidikan didasarkan pada kitab kuning (klasik). Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem pengajian bentuk lama, tanpa memperkenalkan pengajaran pengetahuan umum. Beberapa contoh pesantren yang masih mengikuti pola ini adalah Pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, Pesantren Maslakul Huda di Pati, dan Pesantren Tremas di Pacitan.

Kedua, pesantren khalafi juga disebut sebagai "pesantren modern". Dalam konteks ini, kata "modern" juga sering digunakan sebagai ganti kata "pesantren". Salah satunya adalah "Pondok Modern Darussalam" yang terletak di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Hampir semua pengetahuan akademik di pesantren khalafi berasal dari buku-buku kontemporer yang ditulis oleh para ulama pada abad ke-20, dan mereka tidak lagi mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Pesantren khalafi ini memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya atau membuka sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Meski demikian, terdapat sejumlah pesantren besar, seperti Pesantren Tebuireng dan Rejoso di Jombang, yang telah membuka SMP, SMA, dan universitas sembari tetap mempertahankan kitab-kitab Islam klasik (Dhofier, 1982).

Pesantren khalafi, terutama yang mengikuti model Gontor, menyebut institusi pendidikan mereka Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI) atau Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah (TBI) dan menghindari menggunakan istilah "madrasah". Nama-nama tersebut dikaitkan dengan substansi sistem pendidikan yang juga menghasilkan guru-guru agama Islam. Penting untuk dicatat bahwa pesantren kontemporer memainkan peran penting dalam membangun fondasi baru untuk perkembangan pesantren di Indonesia. Berbagai jenis pesantren baru muncul sebagai hasil dari embrio pesantren modern. Jenis-jenis baru ini merupakan ekspansi dari pesantren modern. Selain itu, munculnya pesantren kontemporer menjadi bukti keberhasilan pesantren dalam menghadapi tantangan zamannya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia saat ini sambil mempertahankan posisi utamanya sebagai pusat pendidikan Islam (Wahid, 1999).

Amin Haedari, di sisi lain, membagi pondok pesantren ke dalam empat kategori: (1) pesantren yang memberikan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi Agama Islam) maupun sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan universitas), seperti Pesantren Tebuireng, Jombang, dan Pesantren Syafi'iyah Jakarta. (2) pesantren yang mengajarkan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta; (3) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MD), seperti Pesantren Lirboyo Kediri dan Pesantren Tegalrejo Magelang; dan (4) pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian. (Haedari, 2006).

Upaya lain dalam menjelaskan variasi pesantren adalah melihatnya berdasarkan ideologi atau aliran keagamaan. Beberapa tipologi pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, dipahami dalam kerangka bagaimana sikap dan orientasi keagamaan masyarakat Muslim dalam meyakini dan mempraktikkan ajaran agamanya. Adalah Takeshi Kohno yang membagi masyarakat Muslim Indonesia ke dalam empat tipologi berdasarkan kecenderungan ideologis dan cara umat Muslim dalam menafsirkan prinsip-prinsip Islam yang tersedia serta bagaimana masing-masing kelompok mengimplemetasikan pemahamannya dalam hidup keberagamaan sehari-hari. Pertama, tradisionalis, yang kecenderungan keberagamaannya terkait erat dengan kondisi sosial lokal (pedesaan). Para pemimpin kelompok tradisionalis adalah mereka yang berasal dari pemuka sosial lokal, tuan tanah, dan dalam kasus Indonesia, terutama di Jawa, pemilik tanah di mana sebuah pesantren didirikan.

Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan representasi dari kelompok ini. Muslim nominal yang tidak termasuk kelompok Muslim tertentu, yang umumnya dikategorikan sebagai "nasionalis", juga termasuk ke dalam pengelompokan tradisionalis. Kedua, modernis, yang sebagian besar menganggap perannya di masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan negara (*nation-building*). Kelompok ini berkaitan erat dengan kelompok modernis di Timur Tengah awal abad ke-20 yang menjadi sumber munculnya terma modernis. Kelompok ini memandang bahwa rakyat mestinya dididik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar negaranya dapat bersaing dengan negara maju. Mereka menjalankan lembaga pendidikan yang memberikan baik pelajaran Islam maupun mata pelajaran umum seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Berdasarkan tipologi masyarakat Islam secara umum tersebut, Kohno kemudian menerapkannya ke dalam lembaga pendidikan Islam secara umum dan pesantren secara khusus. Pertama, pesantren tradisionalis, yaitu pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren lain yang terdapat di pedesaan Indonesia. Pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Watan di Pulau Lombok dan Persatuan Umat Islam juga dimasukkan dalam kategori ini. Para tokoh melihat masyarakat pedesaan di mana mereka bertempat tinggal sebagai prioritas.

Manajemen pesantren secara luas dilakukan oleh kiai dan keluarganya, dan kedudukan kepemimpinan kyai bersifat turun temurun. Kurikulum secara kuat bertumpu pada kitab kuning atau teks tradisional Islam, dan metode pengajaran terutama bersifat menghafal teks. Namun demikian, beberapa pesantren besar dalam kategori ini, seperti Pesantren Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur, telah mengadopsi pelajaran umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Kedua, pesantren modernis, yang diwakili oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah dan berlokasi di pusat kota di kota-kota regional. Organisasi serta manajemen pesantren ini berbeda dari sistem umum turun-temurun seperti di pesantren tradisional. Kurikulum lebih dititikberatkan pada pelajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan alam. Pesantren besar dalam kategori modernis ini adalah Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.

Berdasarkan sistem pengajarannya terdapat setidaknya dua metode utama yang umumnya digunakan dalam pengajaran di pesantren tradisional. Pertama adalah metode sorogan atau metode individual. Dalam metode ini, seorang murid mendatangi seorang guru yang akan membacakan beberapa baris Qur'an atau kitab-kitab berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Kemudian murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata seperti yang dilakukan oleh gurunya sehingga para murid diharapkan mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam suatu kalimat bahasa Arab. Murid diharuskan menguasai pembacaan dan terjemahan tersebut secara tepat dan hanya bisa memperoleh tambahan pelajaran bila telah benar-benar menguasai dan mendalami pelajaran sebelumnya. Para guru pengajian dalam taraf ini selalu menekankan kualitas dan tidak tertarik untuk mempunyai banyak

murid. Sistem sorogan ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai pelajaran. Namun metode ini dikenal paling sulit karena menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid (Dhofier, 1982).

Kedua, metode bandongan, atau weton, adalah metode utama dalam pengajaran di pesantren. Metode ini melibatkan sekelompok siswa yang terdiri dari lima hingga lima ratus orang yang mendengarkan seorang instruktur membaca, menerjemahkan, dan memberikan penjelasan dari buku-buku Islam berbahasa Arab. Setiap siswa memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan tentang kata-kata atau istilah yang sulit, baik artinya maupun keterangan. Dalam sistem bandongan ini, kelompok kelas disebut halaqah, yang berarti lingkaran siswa atau kelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Untuk dapat mengikuti metode bandongan, seorang murid harus terlebih dulu mematangkan diri pada tingkat sorogan. Sebab, para murid yang telah menguasai sistem sorogan sajalah yang dapat memetik keuntungan dari sistem bandongan di pesantren. Dalam sistem bandongan, seorang murid tidak harus menunjukkan bahwa ia mengerti pelajaran yang sedang dihadapi. Para kiai biasanya membaca dan menerjemahkan kalimat-kalimat secara cepat sehingga dapat menyelesaikan kitab-kitab pendek dalam beberapa minggu saja. Karena itu, metode ini hanya efektif untuk santri tingkat menengah dan tingkat tinggi (Dhofier, 1982).

Terkait materi pelajaran agama yang diajarkan di pesantren, Dhofier membaginya ke dalam 8 kelompok: (1) nahwu dan sharaf; (2) fikih; (3) usul fikih; (4) hadis; (5) tafsir; (6) tauhid; (7) tasawuf dan etika; dan (8) cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Sementara kitab-kitab yang digunakan meliputi teks-teks yang sangat pendek sampai yang berjilid-jilid yang terbagi ke dalam tiga kelompok: (1) kitab-kitab dasar; (2) kitab-kitab tingkat menengah; (3) kitab-kitab besar (Dhofier, 1982). Sementara Madjid membagi bidang pengajaran di pesantren ke dalam 7 bidang: (1) nahwu- sharaf; (2) fikih; (3) aqidah; (4) tasawif; (5) tafsir; (6) hadis; dan (7) bahasa Arab (Madjid).

Pesantren tradisional umumnya tidak mengenal istilah kurikulum. Sebabnya dua hal. Pertama, banyak pondok pesantren memang tidak mempunyai kebiasaan untuk merumuskan dasar dan tujuan pendidikannya secara eksplisit, ataupun merencanakan pelajarannya dan masa belajarnya dalam bentuk kurikulum. Kedua, kurikulum pesantren memang sebenarnya meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan di pesantren selama sehari semalam. Banyak kegiatan di luar pelajaran yang bernilai pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan pesantren, seperti latihan hidup sederhana, mengatur kehidupan sendiri secara mandiri, beribadan dengan terbit, dan lain-lain (Chirzin, 1974).

Berbeda dengan pesantren tradisional, pesantren-pesantren modern berupaya menyusun kurikulumnya berdasarkan pada pemikiran atas kebutuhan anak didik dan masyarakat. Melengkapi dirinya dengan berbagai cabang ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi, aljabar, ilmu alam, bahasa Inggris, dan lain-lain, pesantren modern merasa metode lama seperti sorogan dan bandongan tidak lagi memadai untuk menyampaikan pengetahuan kepada para murid. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan berbagai pendekatan baru dalam pengajaran berdasarkan kebutuhan bidang ilmunya. Misalnya, dalam pengajaran bahasa Arab dipergunakan metode langsung yang diarahkan pada penguasaan secara aktif dengan memperbanyak latihan baik lisan maupun tertulis. Dalam pengajaran nahwu, fikih, dan ilmu alam, pengajaran dimulai dengan contoh-contoh yang diajukan, yang kemudian diuraikan oleh guru dan disimpulkan oleh murid. Dalam ilmu bumi, contoh lainnya, dipergunakan metode dari penjelasan umum (kesatuan sistem) kepada penjelasan khusus (kedudukan dan fungsi masing-masing). Dengan menggunakan sistem madrasi dan klasikal, pengajaran di pesantren modern mempergunakan alat peraga, evaluasi

dalam berbagai variasinya dan juga latihan-latihan. Prinsip-prinsip psikologi pendidikan diterapkan, demikian pula kenaikan kelas, pembagian kelas, dan pembatasan masa belajar diadakan. Pendidikan dan pengajaran dikelola dalam sistem administrasi dan organisasi yang tertib (Chirzin, 1974).

KESIMPULAN

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat mendorong pesantren untuk menyesuaikan diri, khususnya dengan kebutuhan anak didik. Hal itu karena pesantren menyadari bahwa adaptasi terhadap perubahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kontinuitas perannya dalam kehidupan masyarakat Muslim dan sebagai bagian upaya untuk berkontribusi bagi pembentukan Islam Indonesia. Lebih jauh, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bentuk religiusitas pesantren menjadi faktor yang menentukan dalam penciptaan gambaran keislaman Indonesia. Karenanya, tidaklah berlebihan mengatakan bahwa sistem pendidikan di pesantren memiliki relevansi dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal.120-121.
- Anwar, M.Syafii, "The Clash of Religio-Political Thought: The Contest between Radical-Conservative Islam and Progressive-Liberal Islam in Post-Soeharto Indonesia," dalam T.N. Srinivasan, *The Future of Secularism*, (New Delhi: Oxford University Press, 2007), hal. 217.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 4.
- Berg, C.C., "Indonesia", dalam H.A.R. Gibb (ed), *Whither Islam? a Survey of Modern Movement in the Moslem World*, London:1932), hal. 257.
- Bruinessen, Martin van, "Kitab kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia", Jakarta: Penerbit Mizan, 1995
- Burhanudin, Jajat, "Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia," disertasi Ph.D, (Leiden: Universiteit Leiden, 2007), hal. 25-30.
- _____, "Mainstream Islam Indonesia," dalam Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: CSIS, 2007), hal. 13.
- Chirzin, M. Habib, "Agama dan Ilmu dalam Pesantren," dalam M.Dawam Rahardjo, ed., "Pesantren dan Pembaharuan", (Jakarta: LP3ES, 1974), hal. 86 -87.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 18.
- Eliraz, Giora, "Distinctive Contemporary Voice: Liberal Islamic Thought in Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Vol.15, no. 3, 2008, hal. 400.
- Haedari, Amin, "Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial, Jakarta: LeKDIS dan Media Nusantara, 2006, hal. 33.
- Johns, A.H., "Sufism as a Category in Indonesian Literature and History," *JSEAH*, 2, II (1961), hal. 10-23
- Madjid, Nurcholish, "Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan", (Jakarta: Dian Rakyat dan Paramadina, 2010), hal.22.
- _____, "Tasawuf dan Pesantren" dalam M.Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974), hal.104.
- _____, "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experiences," dalam *Studia Islamika*, Vol.1, no.1 (April-Juni), 1994, hal. 60.

- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.22
- Sholeh, Badrus (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, LSAF, dan TAF, 2007), hal. 39.
- Tiwari, B.N. dan M.Chatuverdi, *A Practical Hindi-English Dictionary*, (Delhi: Rashtra Printers, 1970), hal. 627
- Van der Chijs, J.A., "Bijdragen tot de Geschiedenis van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch Indie", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, en Volkenkunde*, vol. XIV, 1864, hal.228
- Wahid, Abdurrahman, "Pesantren sebagai Subkultur", dalam M.Dawam Rahardjo (ed), "Pesantren dan Pembaharuan", (Jakarta: LP3ES, 1974), hal. 40.
- Wahid, Abdurrahman, "Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, Suwendi, dan Saefuddin Zuhri, (ed.), "Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren", (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 14

